

Berita Lingkungan Hidup

Rp33,3 Triliun untuk Sungai Citarum

PEMERINTAH meminta jutaan penduduk yang bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum tidak lagi menggantungkan hidup dari pertanian tanaman semusim di lereng-lereng perbukitan, terutama di hulu DAS Citarum. Cara bertani yang salah dituding sebagai biang keladi terjadinya banjir yang kerap melanda daerah cekungan Bandung.

Berbicara dalam Rakor penanggulangan DAS Citarum di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Jakarta, Senin (5/4), Menkokesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah segera akan menyiapkan dana penjaminan hidup bagi masyarakat yang mata pencarian mereka akan dialihfungsikan itu. "Jadi, masalah yang terjadi saat ini ternyata juga mencakup masalah sosial budaya masyarakat setempat. Tak semata masalah penghijauan dan pembangunan infrastruktur," kata Agung tanpa merinci soal dana penjaminan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang juga hadir dalam rakor tersebut, mengatakan, pemerintah pusat dan daerah akan berbagi dana untuk menanggulangi masalah DAS Citarum yang saat ini 50 ribu hektare lahannya sangat kritis. "Masing-masing, baik pemda, kementerian terkait dan pemerintah pusat sudah memiliki anggarannya. Tapi saat ini kami masih berkoordinasi dan menyelesaikan estimasinya dulu," katanya saat ditanya *Jurnal Nasional*.

Pemda Jawa Barat, lanjut Ahmad Heryawan, sejauh ini telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya yang bermukim di bagian hulu Sungai Citarum. Selain alih mata pencarian, program Keluarga Berencana (KB) juga terus digalakkan untuk mengendalikan jumlah penduduk dan transmigrasi.

Khusus transmigrasi, Gubernur Jawa Barat mengatakan, jatah dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selama ini hanya 7000 KK atau setara dengan 2000 jiwa masih jauh dari kebutuhan. Dikatakan, antusiasme masyarakat Jawa Barat sangat tinggi. Apalagi program transmigrasi sekarang berbeda dengan dahulu, sebab banyak kisah sukses menyertai. "Kami siap mengirimkan 5000 KK untuk menanggulangi masalah DAS Citarum ini," kata Ahmad Heryawan.

Lebih jauh ia mengatakan, setiap tahun pemda Jawa Barat telah rutin melakukan reboisasi lahan kritis dengan membeli tanaman kayu sebanyak 10 juta pohon per tahun. Program ini telah berlangsung sejak 2003. "Sampai saat ini sudah 70 juta pohon kami tanam. Untuk reboisasi lahan 50 ribu lahan kritis di DAS Citarum, kami targetkan 1,5 tahun selesai," katanya.

Namun masalah DAS Citarum tidak hanya sebatas masalah penghijauan. Tapi juga kebiasaan sosial masyarakat yang menyalahi lingkungan. Menanam tanaman semusim seperti sayur mayur itu sebenarnya tidak boleh di kemiringan lahan lebih dari 15 derajat. Kenyataannya, pada kemiringan hingga 60 derajat pun tetap saja ditanamai tanaman semusim. "Ini yang menjadi biang keladi sehingga erosi dan laju sedimentasi yang tinggi menyebabkan Sungai Citarum tidak lagi dapat berfungsi baik," katanya.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, kementeriannya telah menyiapkan dana Rp33,3 triliun untuk anggaran permanen penanggulangan DAS Citarum. Antara lain, untuk pembuatan dan penambahan waduk-waduk dan kolam-kolam baru; juga dana untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan; dan Rp40 miliar lain untuk keperluan mendesak, mencakup pengembalian fungsi-fungsi lahan di sekitar DAS yang rusak dan mendesak diperbaiki. "Juga untuk perbaikan tanggul-tanggul yang jebol dan longsor," katanya.

Djoko meminta masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. "Salah satu penyebab banjir, selain sedimentasi akibat erosi lahan, sampah menjadi biang keladi banjir," katanya.

Pejabat lain yang hadir dalam Rakor Kesra Bidang Penanggulangan Banjir di DAS Citarum adalah Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kepala Waduk Jatiluhur. n
Timur Arif Riyadi